

## PROBLEMATIKA PERUBAHAN KURIKULUM DI DAERAH 3T DALAM PENYESUAIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Bulqis<sup>1</sup>, Dhita Ayu Astrellita<sup>2</sup>, Marno<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

e-mail: [bulqis02@gmail.com](mailto:bulqis02@gmail.com)<sup>\*1</sup>, [dhitaayuastrellita@gmail.com](mailto:dhitaayuastrellita@gmail.com)<sup>2</sup>, [marno@pai.uin-malang.ac.id](mailto:marno@pai.uin-malang.ac.id)<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*Curriculum reform is a strategic policy aimed at improving the quality of national education. However, its implementation in 3T regions (frontier, outermost, and underdeveloped areas) continues to face significant challenges, particularly in aligning with the National Education Standards. This study aims to analyze the problems of curriculum reform in 3T regions in relation to the implementation of the National Education Standards, specifically focusing on graduate competency standards, content standards, process standards, and educational assessment standards. This research employs a qualitative approach using a case study design. Data were collected through in-depth interviews with two teachers working in 3T areas, namely Landak Regency and Kapuas Hulu Regency, West Kalimantan Province. Data analysis was conducted using the Miles, Huberman, and Saldana model through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of the Merdeka Curriculum in 3T regions has not been carried out optimally due to limited facilities and infrastructure, inadequate access to technology and learning resources, low levels of teacher readiness and competence, and high administrative workloads. These conditions have resulted in difficulties in meeting graduate competency standards, limited relevance of content standards, suboptimal learning processes, and inconsistent implementation of educational assessment standards. Therefore, this study recommends the development of curriculum policies that are contextual and adaptive to the characteristics of 3T regions through the simplification of teachers' administrative burdens, strengthening locally based professional development, and providing proportional infrastructure support as well as flexible and sustainable learning and assessment models.*

**Keywords:** Curriculum reform; 3T regions; National Education Standards; Educational inequality.

### ABSTRAK

Perubahan kurikulum merupakan kebijakan strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional. Namun, implementasinya di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam penyesuaian terhadap Standar Nasional Pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika perubahan kurikulum di daerah 3T dalam konteks penyesuaian Standar Nasional Pendidikan, khususnya pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan dua guru yang bertugas di wilayah 3T, yaitu di Kabupaten Landak dan Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di daerah 3T belum terlaksana secara optimal akibat keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya akses teknologi dan sumber belajar, rendahnya kesiapan serta kompetensi guru, serta tingginya beban administrasi pendidik.

Kondisi tersebut berdampak pada sulitnya pemenuhan standar kompetensi lulusan, kurang relevannya standar isi, belum optimalnya standar proses pembelajaran, serta tidak konsistennya pelaksanaan standar penilaian pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan kurikulum yang bersifat kontekstual dan adaptif terhadap karakteristik daerah 3T melalui penyederhanaan administrasi guru, penguatan pelatihan berbasis kebutuhan lokal, serta dukungan sarana prasarana dan model pembelajaran yang fleksibel dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Perubahan kurikulum; Daerah 3T; Standar Nasional Pendidikan; Ketimpangan Pendidikan.

## PENDAHULUAN

Permasalahan pendidikan di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi tantangan signifikan dalam mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat. Berbagai kebijakan perubahan kurikulum terus dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, namun implementasinya belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara optimal di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) (Patandung & Panggua, 2022). Sebagaimana ditegaskan dalam penelitian Wika (2025) ketimpangan akses pendidikan di daerah 3T ditandai oleh hambatan geografis, keterbatasan sarana prasarana, minimnya tenaga pendidik, serta rendahnya akses teknologi yang berdampak pada rendahnya partisipasi dan kualitas pembelajaran peserta didik. Kondisi ini memperlebar kesenjangan pendidikan antara daerah 3T dan wilayah perkotaan.

Fenomena ketimpangan pendidikan ini juga tergambar dalam unggahan di media sosial, salah satunya pada akun TikTok @yharaskd3it2 yang membahas isu kesenjangan pendidikan yang terjadi antara pulau Jawa dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terpencil). Salah satu unggahan tersebut memberikan pernyataan bahwa kesulitan mengakses buku berkualitas dikarenakan sulit menemukan toko buku. Selain itu, ketimpangan pendidikan di Indonesia terlihat melalui hasil lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat SMA/ sederajat tahun 2024 yang menunjukkan bahwa Jawa Timur sebagai juara umum (Yharaskd3it2, 2024). Fakta tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan pendidikan tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga berdampak nyata pada pencapaian akademik peserta didik di tingkat nasional, sekaligus menegaskan adanya problematika dalam pemenuhan standar nasional pendidikan.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari karakteristik khusus yang dimiliki oleh daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) dalam aspek geografis, sosial, ekonomi, dan akses layanan publik, termasuk pendidikan. Secara geografis, wilayah 3T umumnya berada pada lokasi yang sulit dijangkau, memiliki kondisi alam yang menantang, serta keterbatasan infrastruktur transportasi dan komunikasi. Dari aspek sosial dan ekonomi, masyarakat di

daerah 3T cenderung memiliki tingkat kesejahteraan dan literasi yang lebih rendah dibandingkan wilayah perkotaan, yang berimplikasi pada terbatasnya dukungan lingkungan belajar bagi peserta didik (Syafii, 2018). Dalam konteks pendidikan, karakteristik tersebut berdampak pada minimnya sarana dan prasarana sekolah, keterbatasan akses terhadap sumber belajar, rendahnya pemanfaatan teknologi pendidikan, serta tingginya angka kekurangan dan rotasi tenaga pendidik (Nurhayati & Mulyanti, 2025).

Salah satu aspek yang terdampak langsung oleh ketimpangan pendidikan adalah pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, khususnya dalam implementasi kurikulum di berbagai wilayah (Laia et al., 2025). Dalam kerangka Standar Nasional Pendidikan, kurikulum menuntut tersedianya materi pembelajaran yang memadai, proses pembelajaran yang terstruktur, serta sistem penilaian berbasis kompetensi guna menghasilkan keterampilan yang relevan dengan tuntutan zaman (Saputra & Stiawan, 2024). Dalam hal ini, Michael Fullan memandang perubahan kurikulum sebagai suatu proses sistemik yang keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya, kapasitas pendidik, dukungan kelembagaan, serta konteks implementasi di tingkat satuan pendidikan (Okoyere, 2025). Namun dalam konteks daerah 3T, keterbatasan infrastruktur, rendahnya akses terhadap sumber belajar, serta minimnya tenaga pendidik yang terlatih menyebabkan tuntutan Standar Nasional Pendidikan sulit diwujudkan secara optimal.

Perubahan kurikulum merupakan langkah strategis dalam memastikan bahwa proses pembelajaran yang relevan dengan perkembangan sosial, budaya, dan teknologi. Di Indonesia, kurikulum telah mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan untuk menjawab tantangan zaman, kebutuhan peserta didik, dan tuntutan global (Santika et al., 2022). Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional sering kali mengalami perubahan. Mengutip Raharjo (2020) dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013, dan yang terbaru yaitu kurikulum merdeka. Namun, frekuensi perubahan kurikulum yang tinggi tidak selalu diiringi dengan kesiapan daerah, khususnya wilayah 3T.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan. Sebagaimana penelitian oleh Krisnawati et al., (2024) menunjukkan bahwa sekolah di wilayah perkotaan memiliki akses yang lebih baik terhadap pelatihan guru dan sumber belajar dibandingkan sekolah di daerah pedesaan dan pinggiran. Mawati et al., (2023) mengungkapkan bahwa ketidakmerataan fasilitas

pendidikan, khususnya di sekolah-sekolah terpencil, menjadi kendala utama dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum. Selanjutnya, Irfandi (2025) menegaskan bahwa ketimpangan pendidikan di daerah 3T bersifat struktural, mencakup keterbatasan infrastruktur pendidikan, kesenjangan digital, kekurangan tenaga pendidik, serta kurikulum nasional yang kurang kontekstual, yang berdampak langsung pada rendahnya efektivitas implementasi kurikulum. Penelitian Yasin & Kurniyadi (2025) menyatakan bahwa problematika utama perubahan kurikulum di tingkat satuan pendidikan bukan terletak pada visi kebijakan nasional, melainkan pada strategi implementasi yang belum selaras dengan kondisi faktual di lapangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, khususnya di daerah 3T, dipengaruhi oleh faktor struktural berupa keterbatasan infrastruktur pendidikan, akses sumber belajar dan teknologi, kekurangan tenaga pendidik, serta lemahnya strategi implementasi perubahan kurikulum yang belum selaras dengan kondisi faktual di lapangan. Meskipun berbagai studi telah mengkaji ketimpangan tersebut, kajian yang secara spesifik menganalisis problematika perubahan kurikulum di daerah 3T dalam kaitannya dengan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan masih terbatas. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam problematika perubahan kurikulum di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) dalam konteks penyesuaian terhadap Standar Nasional Pendidikan, khususnya pada aspek standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan dua guru di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), yaitu TAP dan NHA, yang berasal dari Kabupaten Landak dan Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah tersebut dipilih sebagai sampel penelitian karena memiliki karakteristik 3T sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah, terutama keterbatasan akses geografis, sarana pendidikan, dan sumber daya pendidik.

Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, & Saldana melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Hasil wawancara disederhanakan dan disajikan dalam bentuk narasi untuk mempermudah identifikasi hubungan antarkategori, kemudian ditafsirkan, dikaitkan dengan teori, dan

diverifikasi melalui triangulasi untuk memastikan validitas, kredibilitas, dan relevansi temuan terkait problematika perubahan kurikulum di wilayah 3T.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kurikulum dirumuskan dan dikembangkan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan (Wahyudin et al., 2024). Meskipun dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, implementasi kurikulum di daerah 3T menghadapi berbagai problematika yang memengaruhi pemenuhan standar tersebut.

### 1. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal yang mencakup aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Standar ini menjadi acuan untuk menetapkan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, kecuali pada jenjang pendidikan anak usia dini. Pada jenjang tersebut, Standar Kompetensi Lulusan mengacu pada tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini (Kurikulum Merdeka, 2024).

Standar Kompetensi Lulusan sebagai pedoman kelulusan yang menuntut penguasaan sikap, keterampilan, dan pengetahuan, akan sulit dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan sering kali terjadi perubahan kurikulum. Pada kurikulum terbaru yaitu kurikulum merdeka sulit diterapkan di daerah 3T yang memiliki keterbatasan sumber daya, keterbatasan sarana prasarana dan kualitas bahan ajar. Sebagaimana hasil wawancara dengan TAP sebagai berikut:

*“Tantangan dalam mencapai standar kompetensi lulusan yang diinginkan oleh kurikulum merdeka adalah kurangnya waktu pembelajaran dan sarana prasarana di sekolah tempat saya mengajar kurang memadai. Mengingat salah satu metode utama dalam kurikulum merdeka yaitu pembelajaran berbasis proyek yang membutuhkan fasilitas pendukung dan waktu yang cukup.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan SKL pada kurikulum merdeka di daerah 3T memiliki kendala yaitu kurangnya waktu pembelajaran serta fasilitas yang memadai untuk menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek yang menjadi fokus utama kurikulum merdeka. Sebagaimana penelitian oleh Rahmadani & Masbirorotni (2025) memaparkan bahwa implementasi SKL masih menghadapi kendala struktural, terutama keterbatasan sumber daya pendidikan dan sarana prasarana, sehingga sekolah di wilayah tertentu mengalami kesulitan memenuhi tuntutan SKL secara optimal dan capaian lulusan

belum sepenuhnya sesuai standar. Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian Hazimah et al., (2021) menegaskan bahwa keberhasilan pembelajaran dan pencapaian kompetensi lulusan sangat dipengaruhi oleh pengelolaan kurikulum yang efektif serta dukungan sarana prasarana yang memadai. Kurikulum yang dirancang dengan baik, termasuk Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran berbasis proyek, memerlukan fasilitas pendukung agar dapat diimplementasikan secara optimal. Keterbatasan sarana prasarana tidak hanya menghambat pelaksanaan proses pembelajaran, tetapi juga berdampak pada menurunnya motivasi belajar peserta didik dan rendahnya capaian hasil belajar.

## 2. Standar Isi

Standar Isi disusun dengan merumuskan ruang lingkup materi yang selaras dengan kompetensi lulusan. Ruang lingkup materi ini mencakup bahan kajian dalam muatan pembelajaran yang ditetapkan berdasarkan: 1) muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) konsep keilmuan; dan 3) jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Selain itu, standar isi menyesuaikan dengan kemajuan pembelajaran (*learning progression*) peserta didik di setiap jenjang, sehingga ruang lingkup materi pembelajaran dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada pendidik untuk memfasilitasi peserta didik mengembangkan kompetensinya, serta menerapkan prinsip diferensiasi dalam penyusunan materi pembelajaran (Kurikulum Merdeka, 2024). Serta memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan menyelaraskan kurikulum sesuai dengan karakteristik peserta didik, visi misi satuan pendidikan, budaya dan kearifan lokal (Wahyudin et al., 2024).

Pembelajaran kurikulum merdeka berbasis proyek yang berpusat pada siswa untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis, menuntut guru untuk mampu merancang pembelajaran yang lebih kreatif. Namun dalam implementasinya, pembelajaran berbasis proyek ini kurang relevan dengan lingkungan di daerah 3T. Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan dengan NHA mengatakan bahwa:

*“Pembelajaran berbasis proyek kurang sesuai, dikarenakan ada beberapa kendala yang dihadapi. Salah satunya ialah keterbatasan pelatihan guru dalam menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek ini. Selain itu, keterbatasan dalam mengakses pembelajaran digital menyebabkan terhambatnya akses ke materi yang beragam dan berkualitas”*

Berdasarkan pernyataan tersebut, daerah di 3T sangat sulit untuk mengikuti perubahan kurikulum yang terjadi. Keterbatasan akses jaringan internet dan teknologi

menjadi kendala yang paling utama dalam menerapkan kurikulum merdeka sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dalam hal ini TAP juga mengatakan bahwa:

*“Sumber daya yang ada disekolah saja kurang, apalagi materi pembelajaran digital. Mengingat jaringan internet kadang susah. Ini berpengaruh pada penerapan standar isi kurikulum merdeka. Jadi materi pembelajaran hanya dapat diakses melalui buku paket saja.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa standar isi pada kurikulum merdeka yang telah ditetapkan oleh pemerintah kurang relevan dengan kondisi di daerah 3T yang sering kali masih minim akses jaringan internet dan perangkat teknologi. Akibatnya hal ini mempengaruhi penerapan kurikulum merdeka yang mendorong pembelajaran berbasis proyek dan penggunaan teknologi dan mengharuskan adanya variasi materi pembelajaran yang beragam, interaktif, dan inovatif. Sejalan dengan penelitian oleh Utami et al., (2024) menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka masih menghadapi berbagai kelemahan, terutama pada kesiapan guru dan sarana pembelajaran. Guru terkendala oleh minimnya pelatihan dan pemahaman kurikulum, tingginya beban administrasi, serta keterbatasan dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek.

Perubahan kurikulum memerlukan kesiapan guru dalam memahami dan menerapkan metode pembelajaran baru seperti pembelajaran berbasis proyek. Dalam teori *Readiness for Change*, Holt et al., (2007) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi perubahan, termasuk perubahan kurikulum, sangat ditentukan oleh kesiapan guru sebagai pelaksana utama, yang mencakup pemahaman, sikap positif, dan keyakinan terhadap kemampuan diri dalam menerapkan perubahan.

### 3. Standar Proses

Standar proses berfungsi sebagai acuan dalam menyelenggarakan pembelajaran yang efektif dan efisien guna mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, serta kemandirian peserta didik secara optimal. Standar proses mencakup tiga aspek utama yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan aktivitas merumuskan tujuan belajar dalam suatu unit pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran, langkah-langkah untuk mencapai tujuan belajar, dan merumuskan metode untuk menilai pencapaian tujuan belajar. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, sekaligus memberikan ruang bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Penilaian proses

pembelajaran merupakan asesmen yang dilakukan pendidik terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dengan merefleksikan hasil belajar peserta didik (Kurikulum Merdeka, 2024).

Proses pembelajaran yang efektif dan efisien sangat relevan dengan tuntutan pembelajaran abad ke 21 yang menekankan pada keterampilan 4C yang terdiri dari *critical thinking, communication, collaboration, dan creativity*. Selain itu, proses pembelajaran abad ke-21 menekankan pendekatan yang berpusat pada siswa untuk menjawab tantangan era *society 5.0* yang mengintegrasikan teknologi seperti *Internet of Things (IoT)*, *Artificial Intelligence (AI)*, teknologi robot, bahkan *big data* (Indarta et al., 2022). Dalam era ini, guru tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, tetapi juga fasilitator yang membantu siswa untuk menemukan dan mengolah informasi secara mandiri. Akan tetapi, di daerah 3T masih terdapat guru yang masih kesulitan mengadopsi pembelajaran yang berbasis teknologi. Hal ini dikatakan oleh TAP:

*“Terdapat guru yang merasa terbantu dengan metode pengajaran dalam kurikulum merdeka, tetapi ada juga yang tidak terbantu dan merasa kesulitan. Karena kurangnya pelatihan dan tidak semua guru memiliki kemampuan di bidang teknologi”*

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah 3T sangat diperlukan, memberikan pelatihan kepada guru yang fokus pada kebutuhan lokal dan sederhana secara praktis, seperti pelatihan membuat modul ajar sederhana tanpa memerlukan perangkat teknologi yang canggih. Akan tetapi, dalam hal ini pemerintah tetap melakukan upaya pelatihan menyusun modul ajar kurikulum merdeka dengan mengadakan pelatihan secara online. Sebagaimana NHA mengatakan bahwa:

*“Pelatihan guru untuk menyusun modul ajar diikuti secara online melalui Pintar Kemenag”* disamping itu, di sekolah yang berbeda TAP mengatakan bahwa: *“Pelatihan khusus bagi guru dalam menyusun modul ajar sudah pernah dilakukan, tapi jarang terlaksana, tetapi guru tetap berusaha membuat modul ajar semenarik mungkin agar siswa tidak merasa bosan”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, disimpulkan bahwa problematika perubahan kurikulum di daerah 3T menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran berbasis teknologi, khususnya pada pembelajaran abad ke-21. Dalam hal ini, Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) mengembangkan platform pelatihan digital MOOC Pintar sebagai salah satu strategi peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan ASN secara daring, fleksibel, dan terbuka untuk diakses dari berbagai wilayah. Melalui MOOC Pintar, Kemenag



menyediakan berbagai pelatihan profesional, termasuk terkait pengembangan kompetensi digital dan kurikulum, yang dapat diikuti kapan pun tanpa batasan ruang dan waktu (Firmansyah, 2025).

Meskipun demikian, upaya pemerintah melalui penyediaan pelatihan daring seperti MOOC Pintar Kemenag belum sepenuhnya menjangkau seluruh satuan pendidikan, sehingga masih terdapat sekolah yang belum memperoleh akses terhadap program pelatihan tersebut. Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur teknologi juga menghambat inovasi pembelajaran yang berbasis teknologi. Namun, guru di daerah 3T tetap berusaha menyusun modul ajar sederhana yang menarik dan relevan dengan kebutuhan siswa, meskipun tanpa dukungan teknologi canggih.

#### 4. Standar Penilaian Pendidikan

Standar penilaian pendidikan berfungsi sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai hasil belajar peserta didik secara adil, objektif, dan edukatif. Penilaian hasil belajar mencakup penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif bertujuan untuk memantau, memperbaiki proses pembelajaran, dan mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan penilaian sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar pengambilan keputusan terkait kenaikan kelas dan kelulusan (Kurikulum Merdeka, 2024).

Mengutip dalam penelitian Putri & Zakir (2023) mengemukakan bahwa penilaian formatif dilakukan pada setiap pertemuan untuk memantau proses dan pencapaian pembelajaran, sejauh mana perkembangan peserta didik dalam menguasai kompetensi yang harus dicapai. Sementara penilaian sumatif dilakukan pada setiap akhir proses pembelajaran atau akhir suatu periode pengajaran tertentu dengan menggunakan tes-tes yang bertujuan menilai hasil belajar secara keseluruhan, yang akan digunakan sebagai dasar kenaikan kelas dan kelulusan.

Dalam implementasinya, untuk mengukur capaian kompetensi peserta didik sesuai dengan standar kurikulum merdeka mengalami kesulitan yaitu kurangnya waktu pembelajaran di kelas. Hal itu disebabkan oleh tuntutan administrasi kepada guru. Sebagaimana hasil wawancara dengan TAP:

*“Tantangan dalam mengukur capaian kompetensi peserta didik yaitu kurangnya waktu pembelajaran di kelas, karena guru harus mengisi administrasi di PMM (Platform Merdeka Mengajar) yang mengganggu waktu mengajar guru. Disamping itu, NHA juga mengatakan bahwa: “Tantangan yang dihadapi yaitu penilaian yang beragam”.*

Menanggapi pernyataan di atas, penilaian untuk mengukur capaian pembelajaran siswa belum bisa dilakukan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan guru harus mengalokasikan waktu untuk mengisi administrasi di Platform Merdeka Mengajar (PMM). Sehingga mengganggu fokus guru dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, penilaian yang beragam dalam kurikulum merdeka harus memerlukan persiapan dan pelaksanaan yang cukup kompleks yang menyebabkan guru mengalami kesulitan untuk secara konsisten menilai capaian pembelajaran peserta didik secara optimal. Hal ini membutuhkan penyesuaian agar guru dapat membagi waktu dan menyeimbangkan tanggung jawab administratif antara tugas pengajaran dan penilaian. Sejalan dengan hasil wawancara di atas, penelitian Rosyada et al., (2024) menegaskan bahwa peningkatan beban administrasi dalam implementasi Kurikulum Merdeka mengurangi waktu pembelajaran dan mengganggu fokus guru dalam melaksanakan penilaian formatif dan sumatif. Tuntutan penyusunan perangkat, pelaporan capaian pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar menyebabkan penilaian yang beragam belum dapat dilaksanakan secara konsisten dan optimal, sehingga berdampak pada efektivitas pembelajaran di kelas.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di daerah 3T masih menghadapi berbagai problematika dalam penyesuaian terhadap Standar Nasional Pendidikan. Keterbatasan sarana prasarana dan waktu pembelajaran berdampak pada pencapaian Standar Kompetensi Lulusan, minimnya akses teknologi dan sumber belajar memengaruhi relevansi Standar Isi, kesiapan serta kompetensi guru yang belum merata menghambat optimalisasi Standar Proses, dan tingginya beban administrasi menyulitkan pelaksanaan Standar Penilaian Pendidikan secara konsisten. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan kurikulum yang bersifat nasional belum sepenuhnya selaras dengan karakteristik dan kebutuhan daerah 3T.

Upaya peningkatan efektivitas implementasi kurikulum di daerah 3T memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih kontekstual dan adaptif. Penyederhanaan beban administratif guru, penguatan pelatihan berbasis kebutuhan lokal, penyediaan dukungan sarana prasarana yang proporsional, serta pengembangan model pembelajaran dan penilaian yang fleksibel dan tidak selalu bergantung pada teknologi tinggi menjadi langkah strategis untuk mendukung pemenuhan Standar Nasional Pendidikan secara lebih adil dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah, A. (2025). *Kemenag laporkan peserta MOOC Pintar capai 1,3 juta sepanjang 2025*. ANTARA. <https://www.antaranews.com/berita/5247501/kemenag-laporkan-peserta-mooc-pintar-capai-13-juta-sepanjang-2025>
- Hazimah, G. F., Cahyani, S. A., Azizah, S. N., & Prihantini. (2021). Pengelola Kurikulum dan Sarana Prasarana sebagai Penunjang Keberhasilan Pembelajaran Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 9(2), 121–129. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/jppfa.v9i2.44591>
- Holt, D. T., Armenakis, A. A., Feild, H. S., & Harris, S. G. (2007). Readiness for organizational change: The systematic development of a scale. *The Journal of Applied Behavioral Science*, 43(2), 232–255. <https://doi.org/10.1177/0021886306295295>
- Indarta, Y., Jalinus, N., Waskito, Samala, A. D., Riyanda, A. R., & Adi, N. H. (2022). Relevansi Kurikulum Merdeka Belajar dengan Model Pembelajaran Abad 21 dalam Perkembangan Era Society 5.0. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(2), 3011–3024. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i2.2589>
- Irfandi. (2025). Membongkar Kerentanan Struktural: Ketimpangan Infrastruktur Dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 13(3), 391–399. <https://doi.org/10.37081/ed.v13i3.7535>
- Krisnawati, N., Asfahani, & Maliki, A. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pendidikan Dasar Studi Kasus di Sekolah Dasar di Jawa Timur. *Ijelap: Indonesian Journal of Education, Language, and Psychology*, 1(1), 31–40. <https://journal.irsyad.org/index.php/ijelap/article/view/1>
- Kurikulum Merdeka. (2024). *Pengembangan Kurikulum Untuk Mewujudkan Tujuan Pendidikan Indonesia*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi. <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/pengembangan-kurikulum>
- Laia, B., Hulu, J., Dachi, R. R., Waoma, R. T., Wau, S. T., Ndruru, N., Zebua, M., Ndruru, B., Halawa, F. R., Gulo, S., Lase, N., Laia, A., & Giawa, M. (2025). *Kompleksitas Pendidikan Nasional* (A. Laia & D. Harefa (eds.)). CV Jejak.
- Lestari, M. (2025). *Ketimpangan Sosial, Akses Pendidikan di Daerah 3T: Realita yang Terlupakan*. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/melda-lestari-1749017836053768996/ketimpangan-sosial-akses-pendidikan-di-daerah-3t-realita-yang-terlupakan-25JgNGCAqN4/full>
- Mawati, A. T., Hanafiah, & Arifudin, O. (2023). Dampak Pergantian Kurikulum Pendidikan Terhadap Peserta Didik Sekolah Dasar. *Jurnal Primary Edu (JPE)*, 1(1), 69–82. <https://doi.org/10.61116/jkip.v1i3.172>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis* (H. Salmon (ed.)). Sage Publications.
- Nurhayati, & Mulyanti, D. (2025). Strategi Manajemen Pendidikan di Era Digital: Optimalisasi Infrastruktur, SDM, dan Pembelajaran Berbasis Teknologi. *Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin*, 2(4), 376–383. <https://doi.org/https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v2i4.698>
- Patandung, Y., & Panggua, S. (2022). Analisis Masalah-Masalah Pendidikan dan Tantangan Pendidikan Nasional. *Jurnal Sinestesia*, 12(2), 794–805. <https://sinestesia.pustaka.my.id/journal/article/view/277>

- Putri, F., & Zakir, S. (2023). Mengukur Keberhasilan Evaluasi Pembelajaran : Telaah Evaluasi Formatif Dan Sumatif Dalam Kurikulum Merdeka. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(4), 172–180. <https://doi.org/https://doi.org/10.30640/dewantara.v2i4.1783> Mengukur
- Raharjo. (2020). Analisis Perkembangan Kurikulum PPKn: Dari Rentjana Pelajaran 1947 sampai dengan Merdeka Belajar 2020. *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Kewarganegaraan*, 15(1), 63–81. <https://doi.org/10.20961/pknp.v15i1.44901>
- Rahmadani, L., & Masbirorotni. (2025). Analisis Standar Kompetensi Lulusan. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 15(1), 227–233. <https://doi.org/10.33087/dikdaya.v15i1.761>
- Rosyada, A., Syahada, P., & Chanifudin. (2024). Kurikulum Merdeka: Dampak Peningkatan Beban Administrasi Guru terhadap Efektivitas Pembelajaran. *JIEPP: Jurnal Inovasi, Evaluasi, Dan Pengembangan Pembelajaran*, 4(2), 238–244. <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiepp.v4i2.491>
- Santika, I. G. N., Suarni, N. K., & Lasmawan, I. W. (2022). Analisis Perubahan Kurikulum Ditinjau Dari Kurikulum Sebagai Suatu Ide. *Jurnal Education and Development*, 10(3), 694–700. <https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v10i3.3690>
- Saputra, A. A., & Stiawan, A. (2024). Kajian Review Kurikulum K13 dan Kurikulum Merdeka dalam Implikasinya Terhadap Pembelajaran di Masa Mendatang. *SOSEARCH: Social Science Educational Research*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.26740/SOSEARCH.V5N1.P1-17>
- Syafii, A. (2018). Perluasan dan Pemerataan Akses Kependidikan Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 4(2), 153–171. <https://doi.org/10.12928/psikopedagogia.v1i2.4603.154>
- Utami, C. S., Basri, M. H., Ayuningtias, N. A., Suriansyah, A., & Cinantya, C. (2024). Analisis Kelemahan Implementasi Kurikulum Merdeka di SDN Sungai Miai 1: Studi Kasus pada Kesiapan Guru dan Sarana Pembelajaran. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(4), 2319–2327. <https://doi.org/https://doi.org/10.60126/maras.v2i4.640>
- Wahyudin, D., Subkhan, E., Malik, A., Hakim, M. A., Sudiapermana, E., Alhapip, L., Anggraena, Y., Maisura, R., Solihin, N. R. A. S. A. L., Ali, N. B. V., & Krisna, F. N. (2024). Kajian Akademik Kurikulum Merdeka. In Zulfikri & A. Wihdiyanto (Eds.), *Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi*. [https://kurikulum.kemdikbud.go.id/file/1711503412\\_manage\\_file.pdf](https://kurikulum.kemdikbud.go.id/file/1711503412_manage_file.pdf)
- Wika, M. (2025). Antara Komitmen dan Realita: Studi Kualitatif Terhadap Kebijakan Pemerataan Pendidikan di Wilayah Terpencil Merauke. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(1), 89–96. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i1.376>
- Yasin, & Kurniyadi, M. D. (2025). Problematika Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. *Edulogia: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 1(1), 18–23. <https://ejournal.aripendis.com/edulogia/article/view/4>
- Yharaskd3it2. (2024). *Pendidikan*. Tiktok. <https://vt.tiktok.com/ZSPx1CTko/>